

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah biasanya tampak dari kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karenanya, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator krusial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pembangunan (Todaro & Smith, 2020). Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di Tingkat nasional maupun daerah. Kemampuan suatu wilayah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa kebijakan Pembangunan yang diterapkan telah berjalan secara efektif dalam mendorong perkembangan perekonomian (Alfira, 2023).

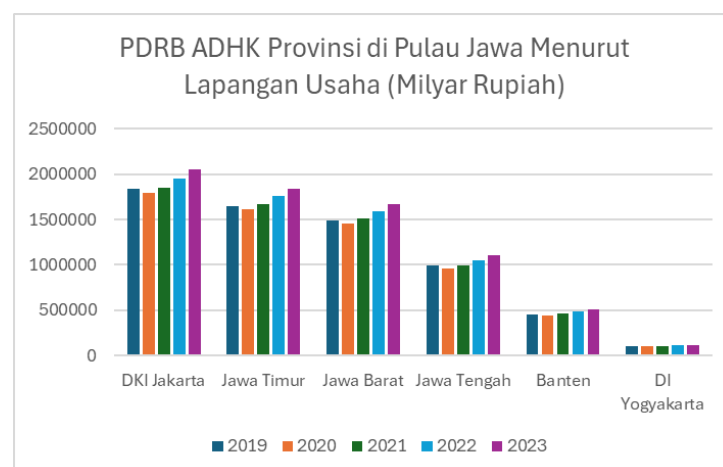
BPS menetapkan PDRB digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. PDRB mencerminkan keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dalam periode tertentu tanpa mempertimbangkan kepemilikan faktor produksi (Azhari, 2021).

Penerapan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah sesuai dengan karakteristik serta potensi wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dan faktor produksi yang dimiliki dalam mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu indikator yang mencerminkan hasil aktivitas ekonomi daerah adalah PDRB.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, perjalanan perekonomian tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan saling berkaitan masih memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian di setiap wilayah. Guncangan ekonomi global, pandemi COVID-19, serta perubahan pola investasi dan ketenagakerjaan telah memengaruhi kinerja ekonomi nasional maupun regional. Dalam kondisi tersebut, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli, menarik investasi domestik, serta kemampuan sektor tersebut dalam membuka kesempatan kerja menjadikannya salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah dan pertumbuhan PDRB

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia sehingga dikenal sebagai pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun berada dalam satu awasa, setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki karakteristik serta sktruktur perekonomiannya yang berbeda-beda, baik dari sisi struktur ekonomi, tingkat industrialisasi, maupun kapasitas fiskal (Maharani, 2022).

Gambar 1.1. Nilai PDRB ADHK di Pulau Jawa 2019-2023



Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan data PDRB ADHK periode 2019-2023, DKI Jakarta tetap mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan kontribusi PDRB terbesar, hal ini sejalan dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, keuangan, perdagangan, dan jasa nasional. Sedangkan, PDRB DIY masih berada di bawah provinsi lain di Pulau Jawa, sehingga menempatkannya sebagai wilayah dengan nilai PDRB terendah di kawasan tersebut. Sehingga tercermin keterbatasan skala ekonomi DIY dibandingkan daerah dengan basis industri besar.

Meskipun demikian, tren PDRB ADHK DIY selama periode 2019-2023 menunjukkan peningkatan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020, PDRB DIY kembali tumbuh secara bertahap hingga tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan adanya kemampuan pemulihan ekonomi daerah meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih relatif rendah, sehingga perkembangan ekonominya belum secepat wilayah lain di kawasan tersebut.

Ketimpangan capaian PDRB di berbagai provinsi menunjukkan bahwa dinamika perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi luar wilayah tersebut. Faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah, seperti kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, besarnya investasi yang masuk, dan penyerapan tenaga kerja, juga memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Provinsi DI Yogyakarta, pelaksanaan pembangunan ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena DIY memiliki status keistimewaan yang diatur secara khusus melalui Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-

undang tersebut mengatur kewenangan keistimewaan DI Yogyakarta yang meliputi tata cara pengisian jabatan Gubernur, dan wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah, daerah DI Yogyakarta, Kebudayaan, Pertahanan, dan tata ruang. Pengaturan tersebut juga memberikan kedudukan hukum kepada Kesultanan dan Kadipaten serta melembagakan peran dan tanggung jawab keduanya dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Yogyakarta. Dengan demikian, DIY memiliki karakter kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersifat khusus dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

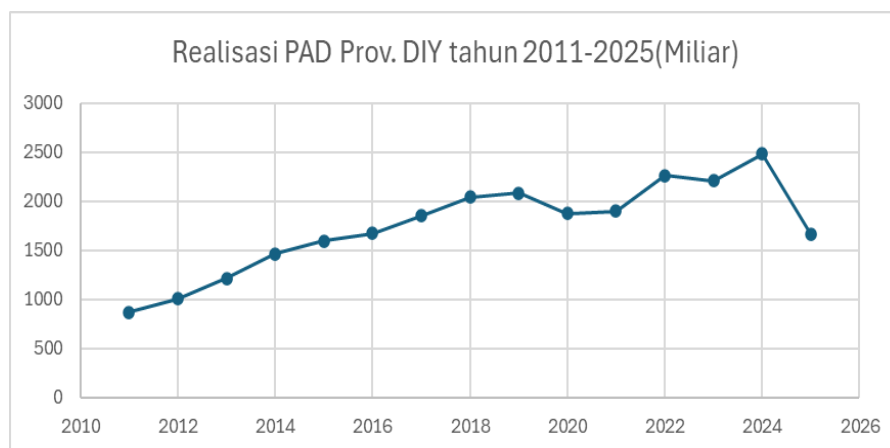
Kekhususan tersebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya daerah yang dapat memengaruhi aktivitas pembangunan. Melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY, kewenangan keistimewaan dijabarkan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, dan pendanaan. Selain itu, penyelenggaraan urusan keistimewaan didukung melalui Dana Keistimewaan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di DIY tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berlangsung dalam kerangka kelembagaan, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya yang memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PDRB DIY menjadi relevan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik keistimewaan daerah tersebut.

Secara teoritis, aktivitas perekonomian Seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri disebut sebagai PAD. Penerimaan tersebut bersumber dari pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai jenis pendapatan lain yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Alfira, 2023). Pertumbuhan PAD mencerminkan keleluasaan kapasitas fiskal daerah untuk menopang agenda pembangunan. Namun, peningkatan penerimaan ini belum tentu linier dengan kenaikan PDRB jika struktur pembelanjanya masih didominasi oleh beban operasional alih-alih alokasi produktif yang menghasilkan *added value*.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah turut terwakili dari peningkatan PAD tersebut. Terciptanya akumulasi penerimaan yang tinggi akan mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, yang pada tahap berikutnya memicu kenaikan angka pertumbuhan ekonomi wilayah yang terukur dari nilai PDRB (Wulansuci, 2021).

Gambar 1.2. Realisasi PAD Provinsi DIY tahun 2019-2023



Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah

Berdasarkan perkembangan realisasi PAD Provinsi DIY selama 2011-2025, PAD menunjukkan kecenderungan meningkat dari sekitar Rp880 miliar pada tahun 2011 hingga mencapai sekitar Rp2,5 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kapasitas penerimaan daerah. Namun,

peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan PDRB dalam proporsi yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya penerimaan daerah belum secara langsung menggambarkan besarnya output ekonomi yang dihasilkan, sehingga pengaruh PAD terhadap PDRB perlu diuji secara empiris.

PAD DIY juga didukung oleh pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan utama. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah DIY tahun 2023, PAD berbasis akrual tercatat sebesar Rp2,42 triliun, dengan pendapatan pajak daerah sekitar Rp2,07 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam PAD DIY.

Selain PAD, investasi juga menjadi merupakan faktor yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi domestik berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui pembentukan modal, perluasan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, besarnya nilai investasi belum tentu langsung meningkatkan PDRB karena dampaknya dipengaruhi oleh sektor tujuan investasi, efektivitas realisasi proyek, serta waktu yang dibutuhkan hingga investasi tersebut menghasilkan output ekonomi. (Kasidi & Fitri, 2024).

Dalam penelitian ini, investasi yang digunakan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), bukan Penanaman Modal Asing (PMA). Pemilihan PMDN didasarkan pada perkembangan realisasi investasi di Provinsi DIY yang menunjukkan bahwa nilai PMDN relatif lebih besar dibandingkan PMA. Data Pemerintah Daerah DIY menunjukkan bahwa realisasi PMDN meningkat dari sekitar Rp17,25 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp29,98 triliun pada tahun 2023. Pada periode yang sama, realisasi PMA meningkat dari sekitar Rp9,35 triliun

menjadi Rp12,12 triliun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa PMDN memiliki nilai realisasi yang lebih besar dalam struktur investasi DIY .

Perkembangan investasi pada tahun 2023 semakin memperlihatkan dominannya peran PMDN. Total realisasi investasi DIY mencapai sekitar Rp42,10 triliun, yang terdiri atas PMDN sebesar Rp29,98 triliun dan PMA sebesar Rp12,12 triliun. Dibandingkan tahun 2022, total realisasi investasi meningkat sekitar Rp5,70 triliun atau sebesar 16 persen. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh PMDN yang memberikan tambahan realisasi sekitar Rp5 triliun, sedangkan PMA memberikan tambahan sekitar Rp0,7 triliun. Oleh karena itu, penggunaan PMDN sebagai variabel investasi dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa investasi domestik memiliki nilai realisasi dan perkembangan yang lebih besar dalam perekonomian DIY.

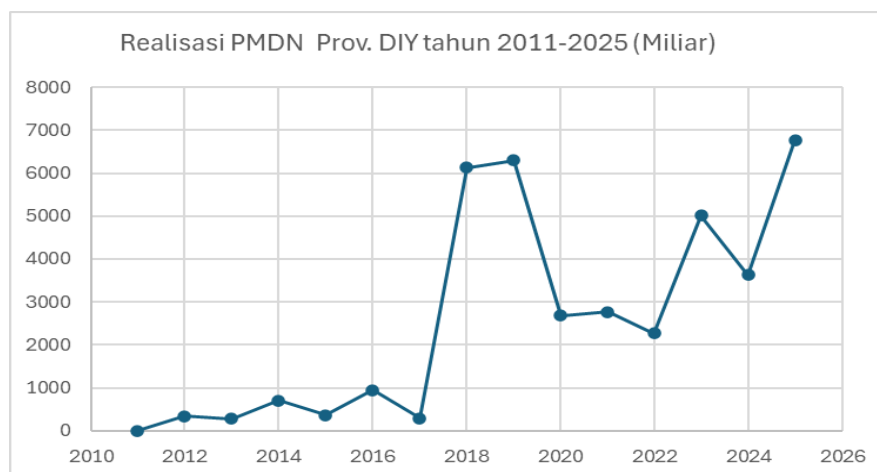
Pemilihan PMDN juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana investasi yang berasal dari pelaku domestik berkaitan dengan pembentukan PDRB daerah. PMDN dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi melalui pembentukan modal, perluasan kegiatan usaha, peningkatan permintaan terhadap input produksi, serta penciptaan kesempatan kerja. Dengan demikian, peningkatan investasi domestik berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru dan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan oleh perekonomian daerah. Fokus pada PMDN juga sesuai dengan kondisi DIY yang menunjukkan bahwa investasi domestik memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan PMA selama beberapa tahun terakhir.

Realisasi PMDN di DIY tidak hanya terkonsentrasi pada satu kegiatan ekonomi, tetapi tersebar pada berbagai sektor. Investasi domestik di DIY antara lain berkaitan dengan transportasi, pergudangan dan telekomunikasi; perumahan,

kawasan industri dan perkantoran; listrik, gas dan air; perikanan; kehutanan; industri makanan; industri tekstil; industri kayu; industri kertas dan percetakan; industri kulit dan alas kaki; serta hotel dan restoran. Keragaman sektor tersebut menunjukkan bahwa PMDN memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bagi daerah. Dengan demikian, perkembangan PMDN menjadi penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan pembentukan PDRB DIY karena dampak investasi tidak hanya berasal dari satu sektor, tetapi dapat menyebar melalui berbagai kegiatan ekonomi.

PMDN penting untuk menstimulasi perekonomian negara berkembang dan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi domestik. Jenis investasi ini melibatkan investor domestik yang menggunakan modal lokal untuk terlibat dalam kegiatan bisnis di Republik Indonesia (Tanjung et al., 2024).

Gambar 1.3. PMDN Provinsi DIY



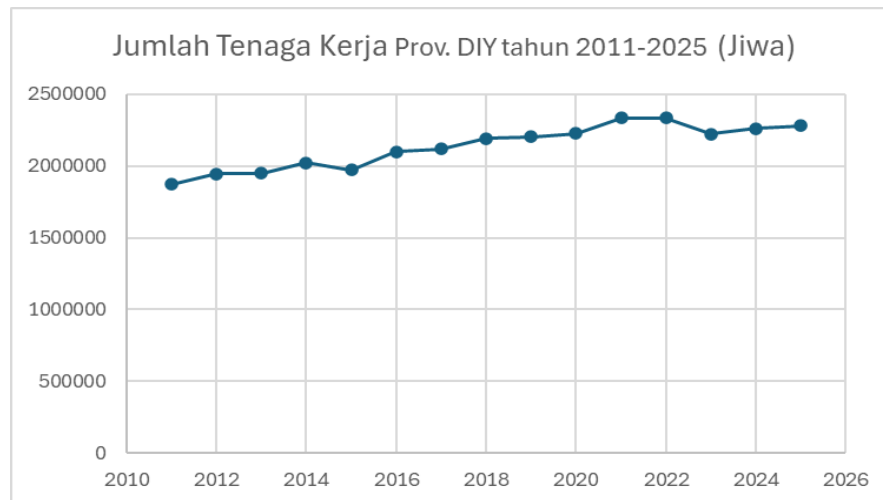
Sumber: BPS DIY, data diolah

Berdasarkan grafik di atas, realisasi PMDN tahun 2011-2025 di Provinsi DIY menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Nilai investasi masih relatif rendah pada periode 2011-2017, kemudian melonjak tajam pada tahun 2018-2019 hingga mencapai Rp 6 triliun. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan

investor dalam negeri terhadap iklim investasi di DIY. Namun, dari tahun 2020 hingga 2022, nilai PMDN kembali menurun akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak investor menunda ekspansi bisnis. Memasuki periode 2023-2025, investasi dalam negeri kembali meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS, serta pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata di DIY. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa investasi dalam negeri sensitif terhadap kondisi makroekonomi.

Peningkatan PDRB suatu daerah tidak lepas dari kontribusi penting sektor ketenagakerjaan. Merujuk pada pandangan ekonomi klasik, faktor produksi mendasar yang mengeksekusi langsung proses manufaktur dan penyediaan jasa adalah tenaga kerja. Produktivitas ekonomi wilayah pun akan mengalami kenaikan seiring dengan meluasnya penyerapan tenaga kerja yang diimbangi oleh penguatan kualitas sumber daya manusianya (Mankiw et al., 1992). Bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki struktur ekonomi berbasis jasa, keberadaan tenaga kerja yang terampil menjadi salah satu modal utama dalam mendukung peningkatan aktivitas ekonomi

Gambar 1.4. Tenaga Kerja Provinsi DIY



Sumber: BPS DIY, data diolah

Dari sisi tenaga kerja, Jumlah pekerja di Provinsi DIY menunjukkan tren kenaikan yang relatif selama periode 2011 hingga 2025. Jumlah pekerja meningkat dari sekitar 1,87 juta orang pada tahun 2011 tahun 2025 naik menjadi lebih dari 2,2 juta orang. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah pekerja, yang diyakini dipengaruhi oleh perubahan di pasar tenaga kerja pasca pandemi serta penyesuaian hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Secara umum, peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak penduduk dalam kelompok usia produktif dan penyerapan tenaga kerja semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi. Situasi ini menghadirkan peluang penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung pertumbuhan PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga faktor tersebut, yaitu PAD, PMDN, dan tenaga kerja merupakan faktor yang saling berkaitan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. PAD memberikan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Investasi domestik dapat meningkatkan

pembentukan modal dan kapasitas produksi, sedangkan tenaga kerja berperan dalam proses produksi barang dan jasa. Interaksi ketiga faktor tersebut secara teoritis dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDRB daerah.

Perbedaan perkembangan PAD, PMDN, tenaga kerja, dan PDRB tersebut menunjukkan bahwa peningkatan masing-masing faktor belum tentu menghasilkan perubahan PDRB dalam arah dan besaran yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana PAD, PMDN, dan tenaga kerja memengaruhi PDRB di Provinsi DIY. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap PDRB.

Pengaruh PAD, investasi, serta keberadaan tenaga kerja terhadap PDRB telah dibuktikan oleh sejumlah studi terdahulu, kendati hasilnya masih memperlihatkan inkonsistensi antarwilayah maupun cakupan periode waktu. Di samping itu, terbatasnya durasi pengamatan serta variasi unit analisis pada penelitian-penelitian terdahulu menjadi keterbatasan tersendiri. Adanya dinamika tersebut mengindikasikan sebuah *gap* penelitian (*research gap*) yang krusial untuk ditelaah secara lebih mendalam melalui pendekatan analisis yang komprehensif.

Temuan Wulansuci (2021) memperlihatkan bahwa PAD, PMDN, dan Angkatan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode 2013-2019, sedangkan PMA tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, ANGGRAINI (2012) dalam penelitiannya di kabupaten kampar menemukan bahwa hanya PAD yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sementara tenaga kerja dan PMDN tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. menemukan hasil yang berbeda yaitu PAD terbukti berpengaruh

signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Kampar, sedangkan variabel Tenaga Kerja dan Investasi tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh PAD, investasi, dan tenaga kerja terhadap PDRB. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki perbedaan wilayah dan periode pengamatan. Penelitian Wulansuci (2021) menggunakan Provinsi DIY dengan periode 2013-2019, sedangkan penelitian Anggraini (2012) menggunakan Kabupaten Kampar. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menggunakan periode 2011-2025 untuk menangkap kondisi sebelum pandemi, masa pandemi, dan periode pemulihan ekonomi di Provinsi DIY. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih sesuai dengan dinamika perekonomian DIY.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, PMDN, dan tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi DIY. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan terkait optimalisasi pendapatan daerah, pengembangan investasi domestik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan data tahun 2011-2025 untuk menggambarkan dinamika perekonomian sebelum pandemi COVID-19, selama masa pandemi, dan periode pemulihan ekonomi. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, penelitian ini berjudul "**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merumuskan pembahasan pada pengaruh antara PAD, PMDN, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pembatasan tersebut dilakukan adar pembahasan penelitian tetap terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan periode pengamatan 2011-2025, variabel yang ditempatkan sebagai variabel independen terdiri atas PAD, PMDN, dan Tenaga kerja. Sementara itu, PDRB sebagai variabel dependen dalam penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Hasil analisis mengenai PAD, PMDN, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan penguatan penerimaan daerah, penciptaan iklim investasi yang mendukung, serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya informasi tersebut, perencanaan pembangunan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian daerah.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan PDRB, khususnya PAD, PMDN, dan Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi maupun bahan perbandingan bagi pembaca, terutama mahasiswa dan pihak lain yang berminat melakukan kajian mengenai ekonomi pembangunan dan ekonomi regional.

3. Bagi Penulis

Pelaksanaan penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai teori ekonomi pembangunan dan ekonomi regional serta penerapannya dalam kondisi perekonomian daerah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data kuantitatif serta menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan bukti empiris. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama proses penelitian diharapkan dapat menjadi bekal bagi penulis dalam memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah.